



C. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Perikanan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - a) Pengembangan bibit ikan unggul
 - b) Pembinaan dan pengembangan perikanan
 - c) Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan
 - d) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK)
- 2) Program pengembangan sistem penyuluh perikanan dengan kegiatan evaluasi pelaku usaha perikanan
- 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - a) Optimalisasi peran kelembagaan pemasaran
 - b) Gerakan pemasyarakatan hasil perikanan
 - c) Peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar hasil perikanan
- 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - a) Pemetaan potensi pengembangan perikanan
 - b) *Restocking* perairan umum

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan urusan perikanan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - a) Pembelian calon induk Lele Sangkuriang 800 ekor dan pembelian pakan ikan 30 zak.
 - b) Benih calon induk Ikan Nila 99 kg, dan pembelian pakan 30 zak.
 - c) Magang pembudidaya Ikan 1 angkatan, Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 1 angkatan, kursus pembudidayaan ikan 2 angkatan, kursus manajerial kelompok 1 angkatan, dan pelatihan budidaya Ikan Gurami 1 angkatan.
 - d) Pengelolaan administrasi usaha perikanan 12 bulan dan buletin tiga bulanan OVA 2.000 lembar.

-
- e) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) lokal 1 paket, sumur produksi 10 unit, kolam penampungan benih 20 unit, peralatan pengolahan ikan 1 paket, perlengkapan dan mebelair bangsal pengolahan hasil perikanan 1 paket, bangsal pengolahan hasil perikanan 1 paket, dan penyediaan sarana penyuluhan perikanan 1 paket.
- 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- a) Evaluasi 17 kelompok pembudidaya ikan kelas pemula di 17 kecamatan, Evaluasi UPR 17 kelompok se Kabupaten Sleman, sarasehan pembudidaya udang galah 4 kali, dan sarasehan pembudidaya gurami 4 kali.
- 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- a) Pencapaian PAD yang berasal dari BBI 100%.
 - b) Pengelolaan UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan 12 bulan, optimalisasi 5 unit BBI, pembelian pakan ikan 100 zak, dan pembuatan brosur bagi pembudidaya ikan 500 lembar.
 - c) Lomba masak ikan dan kudapan dari ikan tingkat kabupaten 1 kali dan penyusunan buku resep Aneka Masakan Ikan dan Kudapan Ikan 100 buku.
 - d) Sarasehan pengolah hasil perikanan 4 kali, sosialisasi gizi ikan 1 angkatan, pemasyarakatan hasil perikanan 4 kali, kampanye makan ikan 4 kali, dan sarasehan pasar kelompok 4 kali.
- 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- a) Pendataan perikanan di 17 kecamatan.
 - b) Penebaran 500 kg benih ikan di perairan umum.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perikanan sebagaimana buku lampiran)

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.51. Produksi Ikan Tahun 2011 - 2013

No.	Produksi Ikan	Tahun Anggaran		
		2011	2012	2013
1.	Ikan Konsumsi (ton)	18.364,10	21.899,20	25.883,79
2.	Ikan Hias (ekor)	11.909.300	13.219.300	14.647.600
3.	Benih Ikan (ekor)	840.182.800	902.701.500	947.330.900

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2013 sebesar 18,20%, produksi ikan hias meningkat sebesar 10,80%, dan produksi benih ikan meningkat sebesar 4,94%. Peningkatan produktifitas perikanan tersebut karena adanya peningkatan luas kolam 8,47%, peningkatan jumlah kelompok pembudidaya 1,09%, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan.

Ketersediaan ikan konsumsi pada tahun 2013 meningkat 3,98% menjadi 29,79 kg/kapita/tahun dari 28,65 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Ketersediaan ikan konsumsi ikan 2013 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketersediaan ikan konsumsi ikan DIY sebesar 24,59 kg/kapita/tahun.

Keberhasilan urusan perikanan dapat pula dilihat dari prestasi yang diraih oleh beberapa kelompok tani ikan sebagai berikut:

- 1) Juara I Nasional dalam rangka Adhibhakti Mina Bahari 2013 kategori Kinerja Kelompok Budidaya Ikan Nila/Mas/Gurami atas nama Kelopok Ikan Tegal Makmur, Kronggahan II, Trihanggo, Gamping.
- 2) Juara harapan I Nasional dalam rangka Adhibhakti Mina Bahari 2013 kategori Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) atas nama Kelompok Mina Ngudi Lestari, Nayan, Maguwoharjo, Depok.
- 3) Juara II, Pembinaan kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pembenih Ikan Tingkat Provinsi, kategori Kelompok Budidaya Lele,

atas nama Kelompok Mina Segar, Kaliurang, Sumberagung Moyudan.

- 4) Juara II Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pembenih Ikan Tingkat Provinsi, kategori Kelompok Budidaya Nila, atas nama Kelompok Gayam Indah, Gabungan, Donokerto, Turi
- 5) Juara III, Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pembenih Ikan Tingkat Provinsi, kategori Kelompok Unit Perbenihan Rakyat (UPR) atas nama Kelompok Mina Sentosa, Macanan, Bimomartani, Ngemplak.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perikanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 55 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perikanan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar Rp3.928.469.310,00 realisasi Rp3.714.041.500,00 atau 94,54%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, anggaran sebesar Rp3.720.034.310,00 realisasi Rp3.506.564.500,00 atau 94,26%.



- 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan, anggaran sebesar Rp 57.000.000,00 realisasi Rp56.922.000,00 atau 99,86%.
- 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, anggaran sebesar Rp103.595.000,00 realisasi Rp103.125.000,00 atau 99,55%.
- 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, anggaran sebesar Rp47.840.000,00 realisasi Rp47.430.000,00 atau 99,41%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan perikanan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perikanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Tingginya harga pakan pabrikan masih menjadi permasalahan dalam budidaya perikanan, solusi yang telah dilakukan adalah dengan pengembangan pakan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan.

2. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - b) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
 - c) Peningkatan kemampuan lembaga petani
 - d) Sekolah Lapang Petani
 - e) Pembinaan dan pengembangan GAPOKTAN
 - f) Pemberdayaan Petani
 - g) Pembinaan dan Evaluasi P3A



- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a) Fasilitas kerja sama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan
 - b) Promosi atas hasil produk pertanian/perkebunan unggulan daerah
 - c) Pemasyarakatan hasil pertanian
 - d) Diversifikasi pengolahan hasil pertanian
 - e) Pengembangan agribisnis pertanian
 - f) Pembinaan panen dan pasca panen
- 3) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - b) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - c) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - b) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)
 - c) Pengelolaan lahan air
 - d) Perlindungan tanaman
 - e) Akselerasi tebu rakyat
 - f) Perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan
 - g) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan mutu tanaman tahunan perkebunan
 - h) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan mutu tanaman semusim perkebunan
- 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
 - b) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan



- c) Pemberdayaan kelompok dan UPT BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan
 - c) Optimalisasi UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
 - d) Pengelolaan klinik hewan
 - e) Penanganan penyakit menular ternak
- 7) Program peningkatan produksi hasil peternakan melalui kegiatan pengembangan agribisnis peternakan
- 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan
 - a) Fasilitasi kerja sama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
 - b) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan
 - c) Optimalisasi UPTD pengembangan budidaya peternakan dan pemotongan hewan
- 9) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan melalui kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan urusan pertanian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a) Pelatihan dan bimbingan pertanian organik 1 angkatan, bimbingan dan pelatihan pengurus Kelompok Wanita Tani 1 angkatan, pelatihan dan bimbingan pertanian organik 1 angkatan, pelatihan dan bimbingan penguatan kelembagaan kelompok tani 1 angkatan.
 - b) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dengan pembinaan manajemen kewirausahaan 1 angkatan.
 - c) Sekolah lapang pertanian melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 2 angkatan.



- d) Evaluasi kelompok tani kelas pemula, lanjut dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) 23 kelompok, penghargaan bagi kelompok berprestasi 9 kelompok, serta peningkatan kelas kelompok 20 kelompok.
 - e) Pelatihan manajemen Gapoktan 2 angkatan, pelatihan kewirausahaan Gapoktan 2 angkatan, pertemuan evaluasi Gapoktan tingkat UPT 17 kecamatan, dan fasilitasi pembinaan gapoktan 1 paket.
 - f) Penyusunan rencana kerja penyuluhan desa di 86 desa dan supervisi penyuluh 2 kali.
 - g) Pembinaan dan evaluasi P3A dengan pertemuan koordinasi tingkat kabupaten 3 kali, pertemuan awal/sosialisasi 4 lokasi, pembinaan dan evaluasi P3A tingkat kabupaten 4 kali, tingkat provinsi 1 kali, tingkat nasional 1 kali, dan penghargaan pembinaan dan evaluasi P3A 3 paket.
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- a) Fasilitasi kerja sama regional, nasional, internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan melalui forum komunikasi pertanian, perikanan dan kehutanan 1 kali, forum komunikasi tiga bulanan (5 bidang) 20 kali, forum komunikasi penyuluh 1 kali, dan forum komunikasi Petugas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 1 kali.
 - b) Temu usaha dan temu bisnis 1 kali dan pasar tani 10 kali.
 - c) Pemasyarakatan hasil pembangunan pertanian melalui *agro and food expo* 1 kali, pameran potensi pembangunan 1 kali, Hari Pangan Sedunia 1 kali dan pameran PF2N (Pekan Flora Flori Nasional) 1 kali.
 - d) Diversifikasi pengolahan hasil pertanian berupa lomba pengolahan makanan basah dan kering tingkat kabupaten 1 kali dan cetak buku 40 buku resep.



- e) Pengembangan sistem informasi harga pasar 12 kali, analisis usaha tani 6 komoditi, temu asosiasi pertanian 10 kali, dan pengelolaan kebun Sub Terminal Agribisnis (STA) 12 kali.
 - f) Pelatihan panen dan pasca panen hortikultura 1 unit, bimbingan teknis penanganan kehilangan hasil pertanian 1 unit, pendampingan *grading packaging house* salak pondoh 1 unit, pelatihan manajerial usaha tani perkebunan komoditas kakao 1 unit, dan temu usaha perkebunan 1 kali.
- 3) Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
- a) Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna berupa traktor dangir 6 unit, alat perajang tembakau 1 unit, *handtractor* 10 unit, genset 5 unit, pembinaan alat dan mesin 1 paket, serta movev alat dan mesin pertanian 1 paket.
 - b) Siaran pedesaan 5 kali, pembuatan leaflet 1.625 lembar, siaran televisi 1 kali, dan penyediaan sarana/media penyuluhan bagi penyuluh 114 paket.
 - c) Sekolah lapang tembakau 4 lokasi dan percontohan budidaya tanaman Tembakau (laboratorium lapangan) 4 lokasi, temu mitra tembakau 1 kali, dan magang pengolahan tembakau 1 kali.
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- a) Pelatihan budidaya tanaman hias dan tanaman pisang 2 unit, pengadaan tanaman pisang 250 batang, dan pengadaan tanaman hias (daun potong) 750 batang.
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan, infrastruktur dan pasca panen pertanian (DAK) melalui rehabilitasi gedung BP3K Sleman 1 paket, rehabilitasi gedung BP3K Pakem 1 paket, pembuatan pagar UPT Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Moyudan 1 paket, pengadaan kendaraan roda dua penyuluh PNS 15 unit, pengembangan prasarana dan sarana lahan (pembangunan jalan usaha tani) 24.500 m², pengembangan sarana dan prasarana air (pengadaan pompa air pertanian) 55 unit,



pembangunan lumbung pangan masyarakat 5 unit, rehabilitasi gedung RPH Mancasan 1 unit, penyediaan sarana produksi perkebunan berupa irigasi air permukaan (pralonisasi) 1 unit dan pembangunan dam parit 1 unit.

- c) Pengolaan lahan dan air dengan terlaksananya administrasi WISMP 2 paket, legalisasi/pemberian Badan Hukum Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) 8 kelompok tani, Sekolah Lapang Iklim 2 angkatan, pelatihan pengembangan agribisnis 5 angkatan, investasi agribisnis/perbaikan saluran tersier terpilih/jalan 187,5 ha, Sekolah Lapang *System Rice of Intensification* (SLSRI) 3 angkatan, pelaksanaan DEM Area SRI 3 kelompok tani, pelatihan penggunaan dana investasi/pelatihan sistem 1 angkatan, pembinaan penyegaran/fasilitasi pembentukan P3A 1 angkatan, sarana prasarana P3A/bantuan pompa air di 5 desa, identifikasi kebutuhan pengembangan pengelolaan 1 paket, sertifikasi lahan pertanian 75 bidang, dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 1 angkatan.
- d) Perlindungan tanaman melalui: pertemuan petandu tingkat kabupaten 2 kali; pertemuan petandu tingkat UPT/BP3K 8 kali; gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 35 kelompok; pembelian obat-obatan 1 paket; kompensasi penangkapan tikus 20.400 ekor; pembelian obat-obatan 1 paket; terlaksananya antisipasi kekeringan dan OPT; pembelian bahan obat-obatan berupa: 7 kg rodentisida, 21 liter insektisida sistemik, 30 kg/lit pestisida BPMP; dan pembangunan 64 unit rumah burung hantu.
- e) Rancangan teknis pengelolaan tebu 1 unit, pendampingan produksi tebu rakyat 1 paket, dan uji tanah 1 unit.
- f) Pengamatan OPT tanaman perkebunan 1 paket, pengendalian hama bubuk buah kopi dengan penarik hypotan 3 kelompok,



- pembelian obat-obatan 3 paket, dan pengendalian hama *oryctes sp* dengan *perangkap* 3 kelompok.
- g) Sekolah Lapang Mendong 1 lokasi dan percontohan budidaya tanaman mendong (laboratorium lapangan) 1 ha.
- 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan
- a) Pelatihan penyuluh swakarsa 1 kali, pelatihan pengelola Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya (P4S) 1 kali dan koordinasi forum teknis penyuluh peternakan, kehutanan dan perkebunan masing-masing 2 kali.
- b) Penyusunan program penyuluhan tingkat UPT BP3K 8 unit dan penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten 1 unit.
- c) Perjalanan tetap petugas lapangan 153 orang, pemberdayaan kelompok 8 paket, koordinasi tingkat UPT BP3K dengan kelompok 8 unit, dan demplot di UPT BP3K 8 unit.
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- a) Pemantauan pasar hewan qurban 4 kali, pengendalian penyakit *zoonosa* 8 kali, pemeriksaan hewan kurban 17 kecamatan, pembelian bahan/alat laboratorium 1 paket, pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostic 80 sampel, dan pembelian pakaian kerja 1 paket.
- b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan melalui pembelian alat laboratorium peternakan 4 unit, pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Ayam (RPA) 4 kali, pemotongan hewan RPH/Keur master RPH 11 kali, pengawasan peredaran daging tingkat kecamatan 5 kali, pengawasan obat hewan 4 kali, koordinasi dokter hewan praktek 3 kali, pengawasan peredaran daging di supermarket dan hotel 4 kali, pembelian bahan laboratorium 10 paket, pemeriksaan susu 250 sampel, pemeriksaan daging 250 sampel, pemeriksaan telur 250 sampel, pengujian residu antibiotika 10 sampel, pengujian cemaran mikroba 10 sampel, dan pembelian bahan kimia 1 paket.

- c) Pemantauan dan pelayanan kesehatan hewan 3 kali, penanganan gangguan alat reproduksi 662 ekor, pengambilan dan pemeriksaan specimen 4.642 sampel, pemantauan kematian ternak 3 kali, pelayanan puskesmas keliling 96 kali, pengadaan bahan dan obat-obatan kesehatan hewan 1 paket, pengadaan papan nama 2 buah, pengadaan leaflet 1.000 lembar, sosialisasi antraks 17 kali, dan evaluasi puskesmas tingkat provinsi 1 kali, monitoring puskesmas 13 kali.
 - d) Pengadaan bahan dan obat-obatan hewan kesayangan 1 paket dan pengadaan alat laboratorium/operasi hewan kesayangan 1 paket
 - e) Pengadaan bahan dan obat-obatan 1 paket, pengadaan alat/bahan laboratorium 1 paket, sosialisasi *Avian Influenza* 34 lokasi, pengadaan perlengkapan kerja 1 unit, pemeliharaan alat laboratorium 1 paket, dan pemeliharaan alat-alat dapur.
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- a) Pengembangan agribisnis peternakan berupa, pembinaan Inseminasi Buatan (IB)/Percepatan Swasembada Daging Sapi (PSDS) 65 kelompok, pengawasan peredaran mutu bibit ternak unggas dan pakan 2 paket, belanja *straw* sapi potong 250 *straw*, , bahan percontohan 4 paket, pemeriksaan sampel pakan 4 sampel, pemeriksaan sampel semen beku 8 sampel, dan data Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 1 paket.
- 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
- a) Temu usaha pemasaran ternak kelinci antar kelompok ternak dengan pelaku pengolah 1 kali, temu usaha pemasaran hasil produksi sapi 1 kali, temu usaha pemasaran hasil produksi sapi antara kelompok ternak dengan industri pengolah susu 1 kali, temu usaha pemasaran hasil pasca panen peternakan pengolah produk dengan pasar modern dan tradisional 1 kali, optimalisasi pengawasan lalu lintas ternak diperbatasan Kabupaten Sleman , Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali 12 kali.

- b) Pelaksanaan kampanye minum susu bagi anak di 3 lokasi, kampanye makan daging kelinci 17 kecamatan, evaluasi pengolahan daging kelinci 17 kecamatan, dan evaluasi pengolahan daging kelinci 1 kali.
 - c) Pengelolaan dan pemeliharaan RPH, serta pengembangan budidaya ternak selama 12 bulan.
- 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- a) Pertemuan asosiasi peternak ayam ras potong 3 kali, demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam 5 unit, pemberian bibit dan pelatihan pembuatan pupuk kandang organik 11 unit, pelatihan pembuatan pupuk organik 4 unit, serta pelatihan pembuatan pakan ternak 5 desa.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2013 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang sebanyak 307.869 ton. Produksi padi mengalami penurunan 1,58% dibandingkan produksi padi tahun 2012 yang mencapai 312.815 ton. Hal ini disebabkan adanya penurunan produktivitas padi sawah, karena adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama tikus, penggerek batang dan penyakit blast (busuk leher malai). Namun demikian produksi padi masih dapat memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sementara produksi beberapa tanaman pangan lainnya, terutama kedelai mengalami penurunan karena terjadinya fenomena perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi) sehingga terjadi penurunan luas tanam kedelai.

Perkembangan beberapa produk tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel 3.52 berikut:

Tabel 3.52. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011-2013 (dalam ton)

No	Produk	Tahun Anggaran		
		2011	2012	2013
1.	Padi sawah	231.374,00	311.378,00	306.201,00
2.	Padi ladang	1.339,00	1.437,00	1.668,00
3.	Beras	147.075,00	197.073,00	194.573,21
4.	Jagung	38.111,00	33.792,00	36.465,00
5.	Kedelai	775,00	479,00	54,00
6.	Ubi kayu	14.741,00	11.670,00	11.482,00
7.	Pisang	6.276,00	4.280,00	19.280,00
8.	Rambutan	16.432,00	13.788,00	8.768,00
9.	Cabe	4.053,00	3.314,00	3.277,60
10.	Kacang Panjang	1.876,00	1.452,00	1.980,40
11.	Salak	41.960,00	53.978,00	70.376,61

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Komoditas perkebunan secara umum mengalami peningkatan produksi diantaranya cengkeh sebesar 42,51%, kopi sebesar 73,37% dan mendong sebesar 3,08%. Produksi tembakau rakyat mengalami penurunan sebesar 48,45% dan tembakau virginia sebesar 61,38%. Hal ini disebabkan karena terjadinya fenomena perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi) sehingga terjadi penurunan luas tanam tembakau di tahun 2013. Komoditas lain yang mengalami penurunan adalah tebu sebesar 35,14% yang disebabkan karena pengaruh anomali iklim di tahun 2013. Hujan yang terjadi sampai bulan Juli menyebabkan tanaman yang siap panen tumbuh anakan baru. Tumbuhnya anakan pada saat menjelang panen menyebabkan rendemen gula menjadi rendah. Serangan organisme pengganggu tanaman terutama uret, tikus dan penggerek batang juga menjadi penyebab menurunnya produksi tebu.

Tabel 3.53. Produksi Perkebunan Tahun 2011-2013 (dalam kwintal)

No.	Produk	Tahun Anggaran		
		2011	2012	2013
1.	Cengkeh	31,00	55,68	79,35
2.	Kelapa	79.098,00	78.429,30	78.444,04
3.	Kopi	223,00	201,34	349,07
4.	Tembakau rakyat	8.181,00	9.246,56	4.776,66
5.	Tembakau Virginia	848,07	632,50	244,26
6.	Mendong	25.951,00	22.967,13	23.673,38
7.	Tebu	48.171,00	59.931,64	38.873,32

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pada bidang peternakan terjadi perkembangan jumlah populasi ternak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.54. Populasi Ternak Tahun 2011-2013 (dalam ekor)

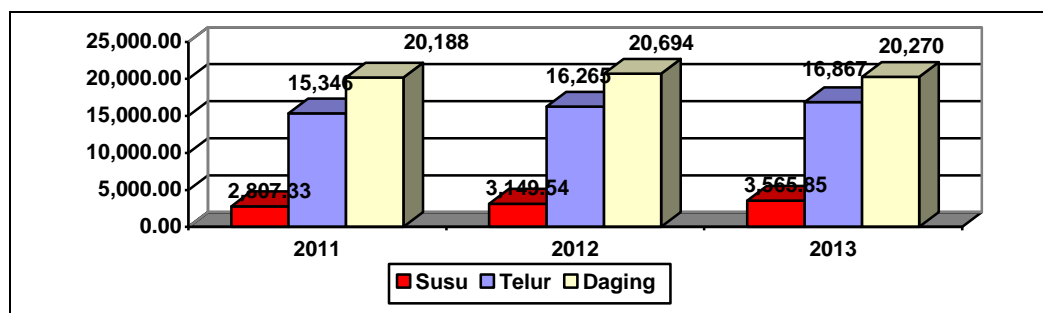
No.	Ternak	Tahun Anggaran		
		2011	2012	2013
1.	Sapi Potong	51.706	54.921	51.642
2.	Sapi Perah	3.522	3.556	3.614
3.	Kerbau	707	757	743
4.	Kambing	35.732	35.895	36.798
5.	Domba	70.698	71.021	71.412
6.	Ayam Buras	1.538.058	1.539.392	1.541.088
7.	Ayam Petelur	1.668.820	1.670.150	1.672.005
8.	Ayam Pedaging	2.713.870	2.716.054	2.718.617
9.	Itik	205.815	206.376	206.419
10.	Burung Puyuh	916.305	950.513	951.332

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Populasi ternak besar (sapi potong) tahun 2011-2012 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,97%. Hal ini dikarenakan harga ternak sapi potong yang masih relatif tinggi, sehingga peternak lebih banyak menjual ternaknya. Adapun ternak kerbau masih terus mengalami penurunan, karena relatif kurang bernilai ekonomis dan siklus reproduksinya sulit dikontrol.

Produksi hasil ternak meliputi telur dan susu mengalami peningkatan di tahun 2013, yaitu telur sebesar 3,7%, dan susu sebesar 13,22%. Sedang produksi daging mengalami penurunan sebesar 2,05% pada tahun 2013. Penurunan ini diakibatkan terjadi penurunan populasi ternak besar (sapi potong) dan adanya seleksi pemotongan ternak betina produktif. Ternak yang masih produktif tidak boleh dipotong karena sebagai ternak bibit untuk pengembangan selanjutnya.

Grafik 3.36. Produksi Hasil Ternak Tahun 2011-2013 (dalam ton)



Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan



Keberhasilan urusan pertanian dapat dilihat dari prestasi yang diraih yakni:

1) Tingkat Nasional

- a. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), kategori Pembina Ketahanan Pangan untuk Kepala Desa atas nama Drs. Hadjid Badawi, Kepala Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir;
- b. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), kategori Pelayanan Ketahanan Pangan Untuk Peneliti, atas nama Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah, M.Agr.Sc., Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- c. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan untuk Pemberdayaan Masyarakat, atas nama Gapoktan Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean;
- d. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan untuk Pengembangan Industri dan Perakit Teknologi Pangan, atas nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Ratu Mulyo, Padukuhan Pelemgurih, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping;
- e. Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saing Tahun 2013, kategori Inovasi Produk Hortikultura (produk Keripik Kulit Pisang), atas nama Kelompok Wanita Tani (KWT) Seruni, Padukuhan Gamelan, Desa Sedangtirto, Kecamatan Berbah;
- f. Juara Harapan I Nasional untuk Kelompok Peternak Sapi Potong, atas nama Kelompok Ternak Ngudi Makmur, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik;
- g. Penghargaan Abdibaktitani 2013, kategori Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi, atas nama UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah VIII Kecamatan Prambanan;
- h. Penghargaan Abdibaktitani 2013, kategori Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi, atas nama UPT Pelayanan Kesehatan Hewan;

- i. Penghargaan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Nasional, atas nama Koperasi Peternakan “Sarono Makmur”, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;
 - j. Penghargaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Berprestasi Tingkat Nasional dengan predikat Tingkat Utama, atas nama P4S “Merapi Farma Herbal”, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem.
- 2) Tingkat Provinsi
- a. Juara II, Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan Komoditas Sapi Potong, atas nama Kelompok Sedyo Makmur, Padukuhan Ngemplak II, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak;
 - b. Juara II, Dokter Hewan Berprestasi dalam rangka Evaluasi Dokter Hewan Tk. Provinsi, atas nama drh. Juwari;
 - c. Juara I, Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi, dalam rangka Evaluasi PTT Tk. Provinsi, atas nama Kelompok Tani Mulyo, Padukuhan Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan;

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan



Kehutanan yang berjumlah 260 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pertanian menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian sebesar Rp9.617.816.860,00 realisasi Rp 8.303.199.564,00 atau 86,33%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran Rp235.273.450,00 dengan realisasi Rp 228.430.950,00 atau 97,09%
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp513.629.150,00 dengan realisasi Rp 490.883.350,00 atau 95,57%
- 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp 791.995.000,00 dengan realisasi Rp735.034.750,00 atau 92,81%.
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp6.927.989.360,00 dengan realisasi Rp5.743.864.964,00 atau 82,91%.
- 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan, anggaran Rp402.430.000,00 dengan realisasi Rp395.340.000,00 atau 98,24%
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, anggaran Rp243.890.000,00 dengan realisasi Rp234.203.150,00 atau 94,10%.
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, anggaran Rp52.669.900.000,00 dengan realisasi Rp52.469.900,00 atau 99,62%
- 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, anggaran Rp64.840.000,00 dengan realisasi Rp66.592.500,00 atau 98,08%
- 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, anggaran Rp380.100.000,00 dengan realisasi Rp359.380.000,00 atau 94,55%.



f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Pertanian melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanian di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Kehutanan dan Perkebunan, serta Bidang Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Produktivitas pertanian tanaman pangan belum maksimal, karena kandungan bahan organik dalam tanah yang rendah akibat penggunaan pupuk yang tidak seimbang terutama pupuk kimia yang berlebihan dan adanya serangan OPT yang mengakibatkan menurunnya produktivitas hasil pertanian. Solusi yang dilaksanakan adalah memperbaiki unsur hara tanah dengan menggalakkan penggunaan pupuk berimbang terutama pemakaian pupuk organik/kandang dan memberikan fasilitasi pengendalian OPT dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian OPT.
- 2) Produksi daging menurun karena menurunnya jumlah sapi yang dipotong dan konsumsi masyarakat beralih ke daging unggas. Solusi yang ditempuh dengan memberikan bantuan sapi dan sarana produksi bagi kelompok ternak.
- 3) Produksi tebu menurun karena penurunan luas panen, produktivitas dan rendemen. Solusi yang ditempuh dengan fasilitasi bongkar ratoon, pemurnian bibit, dan fasilitasi alat mesin pertanian.



3. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - a) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
 - b) Peningkatan pemanfaatan hutan dan lahan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan:
 - a) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan terlaksananya pelatihan petugas penerbit Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) 1 angkatan, pembinaan dan pendampingan pejabat penerbit SKAU 2 kali,
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
 - a) Penanaman 3.500 batang pohon dalam Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) serta pembinaan dan evaluasi gerakan perempuan tanam danelihara 1 paket.
 - b) Peningkatan pemanfaatan hutan dan lahan (DAK) dengan terlaksananya pengkayaan hutan rakyat 1 paket, penghijauan lingkungan 1 paket, unit pelestarian SDA 5 unit pembuatan bangunan sipil teknis 1 paket, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan 1 paket, sarana dan prasarana pengamanan hutan dan hasil hutan 1 paket, administrasi kegiatan 1 paket, pemeliharaan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan 1 paket, pengelolaan hutan kota dan perindang jalan 1 paket.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran)

Luas lahan kritis dan sangat kritis di Kabupaten Sleman menurun seluas 78,90 ha atau 14,35% dibandingkan tahun 2012. Penurunan luas lahan kritis ini diperoleh dari dukungan kegiatan pemerintah, penghijauan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Luas hutan rakyat pada tahun 2012 seluas 4.204,29 ha meningkat sebesar 5,15% menjadi 4.420,72 ha pada tahun 2012. Produksi madu mengalami penurunan sebesar 17,24% dari 1.450 kg di tahun 2012 menjadi 1.200 kg di tahun 2013. Hal disebabkan karena produksi madu sangat bergantung pada ketersediaan bunga sebagai sumber nektar. Pengaruh erupsi merapi tahun 2010 terjadi penurunan tegakan tanaman yang menyediakan bunga.

Tabel 3.55. Data Kehutanan Tahun 2011-2013

No	URAIAN DATA	TAHUN ANGGARAN		
		2011	2012	2013
1	Luas lahan (Ha)	5.707,61	5.934,50	6.148,9
	a. TNGM	1.728,38	1.728,38	1.728,38
	b. Hutan Rakyat	3.977,40	4.204,29	4.418,69
	c. Hutan Kota	1,83	1,83	1,83
2	Luas lahan kritis (Ha)	3.948,41	3.723,77	3.723,77
	a. Potensi kritis	2.721,91	2.828,02	2.906,92
	b. Kritis	875,75	550,00	471,10
	c. Sangat kritis	350,75	345,75	345,75
3	Produksi Madu Lebah (kg)	3.250	1.450	1.200

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Keberhasilan urusan kehutanan dapat dilihat dari prestasi yang diraih di tingkat nasional yaitu prestasi Penyuluh Kehutanan Terbaik I Tingkat Nasional dalam rangka Peringatan HUT RI ke-68 kategori Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional 2013 atas nama Sri Mundayati, SP

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan Kehutanan adalah Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Secara rinci, kedudukan, tugas



pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan kehutanan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 56 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan kehutanan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar Rp1.600.007.800,00 realisasi Rp 1.518.235.990,00 atau 94,89%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, anggaran Rp64.925.800,00 dengan realisasi Rp 61.873.300,00 atau 95,30%.
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, anggaran Rp1.535.082.000,00 dengan realisasi Rp1.456.362.690,00 atau 94,87%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Kehutanan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kehutanan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Hutan rakyat yang rusak akibat erupsi Gunung api Merapi belum dapat dilakukan rehabilitasi secara optimal, karena timbunan material tersebut tidak bisa ditanami tanaman keras. Upaya yang telah dilakukan adalah penghijauan dan konservasi tanah di lahan kritis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.



4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - a) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (BGGC).
 - b) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan.
 - c) Pengelolaan perizinan usaha bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - d) Koordinasi dan pendataan tentang hasil pemanfaatan produksi air tanah
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
 - a) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
 - b) Monitoring evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.
- 3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kegiatan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.
- 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan
 - a) Pemantauan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas.
 - b) Pengembangan energi alternatif.
 - c) Operasional dan pemeliharaan energi terbarukan.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - a) Pemantauan dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan sebanyak 45 kali.
 - b) Dokumen data volume mineral batuan 2 dokumen/buku.
 - c) Ijin Pemakaian Air Tanah 7 buah, Ijin Pengusahaan Air Bawah Tanah 40 buah, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 2 buah, dan penyuluhan perijinan 3 kali,
 - d) Dokumen data pemanfaatan air tanah 2 dokumen/buku.

- 2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dengan realisasi:
 - a) Pengawasan dan penertiban kasus bidang ESDM melalui penyelesaian 8 kasus.
 - b) Pemantauan dan evaluasi dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan rakyat di 2 lokasi, pemantauan dan evaluasi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan air tanah di 2 lokasi, dan laporan hasil penyelesaian kasus bidang ESDM di wilayah Kabupaten Sleman 5 buku.
- 3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan terealisasi koordinasi pengembangan ketenagalistrikan di 5 lokasi.
- 4) Program pengembangan energi terbarukan, dengan realisasi:
 - a) Koordinasi pendistribusian minyak tanah dan gas di 3 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan 13 Agen.
 - b) Instalasi biogas limbah ternak 7 unit.
 - c) Operasional dan pemeliharaan PLTS 161 unit dan Biogas 2 unit.(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana buku lampiran).

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh data perkembangan hasil terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.56. Perkembangan Hasil yang terkait dengan urusan SDAEM 2011-2013

No.	Uraian Data	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	PLTS	187	187	187
2.	PLTMH	4	4	4
3.	Biogas	163	168	175
4.	SPBU	35	36	37
5.	SPBK	3	3	3
6.	Agen Minyak Tanah Non Subsidi	1	1	0
7.	SPPBE	3	3	3
8.	Agen LPG 3 Kg	17	17	16
9.	Agen LPG 12 Kg	2	2	2
10.	Agen LPG >12 Kg	2	2	0

Sumber: Dinas SDAEM

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral berjumlah 19 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp6.461.522.200,00 terealisasi sebesar Rp5.230.934.375,00 atau 80,96%. Secara rinci anggaran masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, anggaran sebesar Rp886.822.500,00 terealisasi sebesar Rp862.301.875,00 atau 97,24%
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, anggaran sebesar Rp124.945.000,00 terealisasi sebesar Rp120.628.700,00 atau 96,55%.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan, anggaran Rp5.188.350.700,00 terealisasi sebesar Rp4.001.776.200,00 atau 77,13%.
- 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan, anggaran sebesar Rp261.404.000,00 terealisasi sebesar Rp246.227.600,00 atau 94,19%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Sumberdaya Air, Energi dan Mineral.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Energi dan Sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam urusan Energi dan Sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Peraturan tentang perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Sleman sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan. Namun Perda ini belum dapat diimplementasikan karena Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sampai saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga izin pertambangan tidak bisa dikeluarkan. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan Kabupaten yang lain di DIY telah menyusun draft Rencana WUP dan telah dikoordinasikan dengan Pemda DIY serta dikirim ke Pemerintah Pusat, tetapi sampai saat ini belum mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat, hal ini berakibat Pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat mengeluarkan Izin Pertambangan.

Solusi yang dilakukan dengan upaya penertiban pertambangan yang sudah ada bertujuan normalisasi sungai berdasarkan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) dan pembinaan penambangan yang berwawasan lingkungan.

5. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Pengkajian dan penelitian pemanfaatan dana promosi pariwisata
 - b) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - c) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
 - d) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
 - e) Pengembangan statistik kepariwisataan
 - f) Pelatihan pemandu wisata terpadu
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Pengembangan daerah tujuan wisata
 - b) Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
 - c) Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung api Merapi
3. Program Pengembangan Kemitraan
 - a) Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.
 - c) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Pengkajian pemanfaatan dana promosi pariwisata 1 dokumen, laporan fasilitasi peningkatan kapasitas promosi pariwisata Kabupaten Sleman 1 dokumen, kepesertaan Pemerintah Kabupaten Sleman pada *Investment & Trade Expo* Tahun 2013 di Makasar 1 kali, penyediaan materi promosi 1 paket, serta fasilitasi dan koordinasi promosi pariwisata (perumusan rancangan pengembangan promosi produk unggulan daerah) 1 dokumen.

- b) Pembuatan materi promosi 6.100 eksemplar leaflet, penggandaan VCD dan CD interaktif 596 unit, dan pelaksanaan pengelolaan website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - c) Pelaksanaan Jelajah Wisata 1 kali, Tour de Merapi 1 kali, Gebyar Pelangi Budaya Bumi Merapi 1 kali, dan Gebyar Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) 1 kali.
 - d) Pameran Potensi Daerah di Kabupaten Sleman 1 kali, Pameran Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta 1 kali, dan Pameran Majapahit Travel Fair di Jawa Timur 1 kali. Travel dialog ke Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, ke Bandung Barat Jawa Barat, dan ke Makasar Sulawesi Selatan. Promosi melalui *Farm Trip* 4 kali. Promosi melalui media berupa 1 kali jumpa pers, 1 kali *talk show* di televisi, dan 4 kali *talk show* di radio.
 - e) Penyusunan buku statistik kepariwisataan 1 dokumen.
 - f) Pelatihan pemandu wisata 1 kali dan sosialisasi sadar wisata 1 kali.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- a) Pemeliharaan lingkungan objek wisata Kaliurang 12 bulan, pengembangan Rumah Domes 1 lokasi, pengembangan tempat wisata Madurejo Prambanan 1 lokasi, pembangunan panggung kesenian Tuk Si Bedug Seyegan 1 lokasi, pembangunan MCK Tuk Si Bedug 1 unit dan 1 ruang ganti, dokumen DED Gardu Pandang 1 unit, dan DED Tlogo Putri 1 unit.
 - b) Sosialisasi peraturan perijinan usaha pariwisata 2 kali, pengawasan dan pelayanan perijinan pariwisata 12 kali, klasifikasi usaha pariwisata 4 kali, pembinaan usaha pariwisata 5 kali, dan klasifikasi desa wisata 12 kali.
 - c) Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung api Merapi (MGM) 12 bulan.
3. Program Pengembangan Kemitraan
- a) Operasional petugas pendampingan desa wisata 12 bulan, operasional petugas pengamanan pariwisata SAR 12 bulan, operasional polisi pariwisata 12 bulan, peningkatan partisipasi

masyarakat melalui sosialisasi sadar wisata di ODTW 2 kali, dukungan pembentukan 2 (dua) Saka Pariwisata.

- b) Fasilitasi forum komunikasi usaha pariwisata 2 kali, fasilitasi pembentukan asosiasi Dimas Diajeng Sleman 2 kali, dan forum komunikasi desa wisata 3 kegiatan.
- c) Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata selama 12 bulan dan pembayaran iuran Java Promo 1 kali.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebesar 5,71%. Penambahan jumlah wisatawan juga didukung adanya peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2013 seperti hotel berbintang 13,04%, hotel melati 2,13%, dan sarana wisata lainnya.

Tabel 3.57. Perkembangan Hasil Terkait dengan Urusan Pariwisata tahun 2011-2013

No.	Uraian Data	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Desa Wisata	35	38	38
2	Usaha Sarana Wisata	766	841	882
	a. Hotel berbintang	20	23	26
	b. Hotel melati	138	141	144
	c. Pondok wisata	239	246	248
	d. Restoran	56	59	61
	e. Rumah makan	208	218	236
	f. Hiburan umum	105	154	167
3	Jumlah Wisatawan	3.277.728	3.418.254	3.613.577
	a. Mancanegara	262.341	341.578	302.796
	b. Nusantara	3.015.387	3.076.676	3.310.781

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keberhasilan urusan pariwisata dapat dilihat dari prestasi yang diraih di tingkat nasional yaitu Penghargaan Travel Club Tourism Award (TCTA) sebagai Best Performance Bidang Pariwisata, dari Majalah Travel Club bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan pariwisata adalah Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan didukung oleh Bappeda dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan Pariwisata di Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 33 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pariwisata menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata sebesar Rp2.389.145.920,00 realisasi Rp2.302.419.720,00 atau 96,37%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran sebesar Rp1.254.032.950,00 terealisasi Rp1.224.032.450,00 atau 97,62%.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran sebesar Rp866.963.970,00 terealisasi Rp818.433.470,00 atau 94,40%.
- 3) Program Pengembangan Kemitraan, anggaran sebesar Rp268.149.000,00 terealisasi Rp259.753.800,00 atau 96,87%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pariwisata melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dan pelaku wisata dengan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata. Solusi yang dilakukan adalah pembinaan kepada pelaku wisata melalui pelatihan dan penyuluhan.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan prasarana sarana pendukung yang terdapat di objek wisata. Solusi yang dilakukan adalah perbaikan dan melengkapi prasarana sarana pariwisata.
- 3) Pemaketan wisata belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah koordinasi dan kerja sama antar pelaku wisata.

6. Urusan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - a) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas.
 - b) Pengembangan sistem inovasi teknologi
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya.
 - b) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
 - c) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
 - d) Pelatihan peningkatan ketrampilan teknologi bagi Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) di lingkungan pabrik rokok.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - a) Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi 30 IKM Sleman dan pelatihan penerapan sistem pengendalian mutu terpadu/Gugus Kendali Mutu (GKM) sebanyak 12 orang.

-
- b) Pelatihan peningkatan kualitas produk Alat Tepat Guna (ATG) bagi 15 orang, pelatihan pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Moyudan 40 orang, pelatihan pengolahan bambu untuk souvenir di Kecamatan Moyudan 20 orang, pelatihan pengolahan makanan ringan di Kecamatan Depok dan Kecamatan Gamping 40 orang, pelatihan pengolahan manisan buah-buahan di Kecamatan Depok 20 orang, pelatihan pembuatan aksesoris di Kecamatan Ngemplak 20 orang, pelatihan batik di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Sleman 80 orang, pelatihan bahan lokal di Kecamatan Kalasan 20 orang, pelatihan pengolahan pisang biji di Kecamatan Minggir 20 orang, pelatihan pengolahan keripik salak di Kecamatan Tempel 20 orang, dan pelatihan sablon di Kecamatan Prambanan 20 orang.
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- a) Pemasangan 35 papan nama usaha bagi setiap pengrajin sentra industri bakpia serta 1 (satu) baliho sentra gudeg.
- b) Fasilitasi koordinasi (perjalanan dinas) ke Jakarta 1 (satu) kali untuk konfirmasi fasilitasi pendanaan penyusunan kajian Kompetensi Inti Daerah dari Kementerian Perindustrian RI.
- c) Forum komunikasi industri kemasan dengan industri kecil pengolahan pangan sebanyak 20 orang dan monitoring bantuan peralatan/mesin bagi industri kecil sebanyak 30 kelompok.
- d) Pelatihan pengolahan pisang di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah sebanyak 20 orang, pelatihan pembuatan roti kering di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah sebanyak 20 orang, pendampingan manajemen usaha IKM di sekitar pabrik rokok di Kecamatan Berbah sebanyak 20 orang, pelatihan pembuatan cinderamata kayu kombinasi fiber di Kecamatan Mlati sebanyak 15 orang, pelatihan kerajinan bambu di Kecamatan Tempel sebanyak 15 orang.



(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian sebagaimana buku lampiran)

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, berhasil meningkatkan jumlah usaha industri sebesar 0,89% dengan penyerapan tenaga kerja 65.324 orang. Nilai investasi meningkat sebesar 1,66% dibarengi dengan peningkatan nilai bahan baku sebesar 0,41%, dan nilai produksi 0,03%.

Tabel 3.58. Perkembangan Hasil terkait Urusan Perindustrian tahun 2011-2013

No.	Uraian Data	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Jumlah usaha industri	15.564	15.835	15.976
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	15.449	15.707	15.841
	b. Industri Besar dan Menengah	115	128	135
2	Penyerapan tenaga kerja	64.291	64.930	65.324
3	Nilai Investasi (Rp000)	488.353.062,64	506.688.492,97	515.100.445,50
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	97.937.744,24	100.875.876,57	102.389.014,70
	b. Industri Besar dan Menengah	390.415.318,40	405.812.616,40	412.711.430,80
4	Nilai Bahan Baku (Rp000)	1.830.790.411,85	1.844.715.578,57	1.852.335.544,00
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	292.131.486,00	297.974.115,72	300.953.856,80
	b. Industri Besar dan Menengah	1.538.658.925,85	1.546.741.462,85	1.551.381.687,20
5	Nilai Produksi (Rp000)	2.954.347.628,77	3.045.354.818,06	3.046.120.007,10
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	644.332.594,00	689.139.482,59	702.922.272,20
	b. Industri Besar dan Menengah	2.310.015.034,77	2.356.215.335,47	2.343.197.734,90
6	Nilai Tambah (Rp000)	1.135.590.860,15	1.200.639.239,49	1.193.784.463,00
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	352.001.068,00	391.165.366,87	401.968.415,30
	b. Industri Besar dan Menengah	783.589.792,15	809.473.872,62	791.816.047,70

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Keberhasilan urusan perindustrian dapat dilihat dari prestasi yang diraih yaitu:

1. Bhre Craft House Boutique, Pengembang Produk Unggulan Kreatif Berbahan Baku Stagen, dari Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Khansa Snack and Food, mendapatkan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) kategori Olahan Abon Tuna dan Lele dan kategori

Olahan Bakso, Nugget dan Otak-otak, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Hayati Susanto, penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara kategori Pengembang Pangan Lokal, dari Kementerian Pertanian.
4. Dina Qoimah, Juara II Pemuda Pelopor Bidang Kewirausahaan Tingkat Provinsi DIY.

a. SKPD Penyelenggara Urusan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan perindustrian adalah Bidang Perindustrian. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perindustrian di Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perindustrian menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian sebesar Rp946.983.000,00 realisasi Rp799.242.700,00 atau 84,40%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, anggaran sebesar Rp606.482.500,00 realisasi Rp477.340.200,00 atau 78,71%.
- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah, anggaran sebesar Rp340.500.500,00 realisasi Rp321.902.500,00 atau 94,54%.



d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Perindustrian melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir.

f. Permasalahan dan Solusi

- 1) Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industri tertentu. Solusi yang dilakukan adalah pengembangan bahan baku industri, penggunaan bahan baku substitusi dan kerja sama dengan daerah lain.
- 2) Produk industri yang dihasilkan kurang dapat memenuhi selera pasar, baik dari sisi desain, kreasi, maupun kualitas. Solusi yang dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang industri kreatif, disamping itu juga meningkatkan kualitas produk dengan inovasi teknologi.
- 3) Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM. Solusi yang dilakukan adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.

7. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a) Fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - b) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - a) Fasilitasi Kabupaten Ekspo
 - b) Pengembangan data base informasi potensi unggulan
 - c) Pembangunan promosi perdagangan internasional
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - b) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan



- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan
 - a) Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan
 - b) Pendataan pedagang di luar dasaran
 - c) Pelayanan taman kuliner Condongcatur
 - d) Monitoring dan evaluasi bantuan modal pedagang
 - e) Penataan PKL di 15 kecamatan
- 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
 - a) Sosialisasi pemeliharaan bangunan
 - b) Kajian pengembangan pasar
 - c) Pemeliharaan bangunan pasar
 - d) Pendampingan pembangunan pasar
 - e) Rehabilitasi pasar tradisional
 - f) Pembangunan pasar
- 6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
 - a) Peningkatan pelayanan pedagang pasar
 - b) Pembinaan pedagang pasar
 - c) Pembinaan pengelola pasar desa
 - d) Penataan pedagang dan tempat dagangan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a) Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 1 kali dan Fasilitasi stimulan pendaftaran HAKI untuk 18 merk dagang terdaftar, 2 hak cipta, dan 1 hak paten.
 - b) Dokumen monitoring distribusi barang dalam pengawasan 4 buku, dokumen monitoring barang rusak dan kadaluwarsa 4 buku, dokumen monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya 4 buku, serta pengawasan peredaran barang dan jasa di pasar tradisional di 4 UPT Pelayanan Pasar.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - a) Fasilitasi kepesertaan dalam OTONOMI EXPO 2013 di Jakarta 1 kali
 - b) Data base informasi potensi unggulan 5 komoditi potensial 15 buku.

- c) Fasilitas Pameran *International Furniture & Craft Fair Indonesia* (IFFINA) 2013 bagi 4 UKM, fasilitas 21 UKM mengikuti pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta, fasilitas 6 UKM mengikuti pameran *International Handicraft* (INACRAFT) di Jakarta, fasilitas 8 UKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) pada pameran Pekan Produk Kreatif di Jakarta, fasilitas 6 perusahaan binaan Dekranasda pada pameran Hari Ulang Dekranas, operasional Dekranasda 12 bulan, dan fasilitas 6 pengrajin binaan Dekranasda mengikuti pameran HUT Ngayogyakarta Hadiningrat di TMII, dan fasilitas 2 UKM mengikuti pameran di Malaysia.
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a) Pembinaan usaha retail tradisional 100 orang.
 - b) Pembuatan 20 site eksisting pasar.
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan :
 - a) Penataan PKL dan asongan di lingkungan pasar dan kantong PKL di 4 lokasi (Kantong PKL Jl. Samirin dan Jl. Pangukan, PKL Pasar Sleman, Pasar Cebongan, dan Pasar Godean).
 - b) Pendataan pedagang di luar dasaran di 5 pasar (Pasar Pakem, Pasar Condongcatur, Pasar Sleman, Pasar Prambanan dan Pasar Godean).
 - c) Pelayanan pengunjung Taman Kuliner Condongcatur 12 bulan dan fasilitas penyelenggaraan festival jajanan tradisional 1 kali.
 - d) Monitoring evaluasi bantuan modal pedagang di 14 pasar (Pasar Kebonagung, Pasar Manggung, Pasar Gentan, Pasar Pakem, Pasar Gamping, Pasar Sambilegi, Pasar Potrojayan, Pasar Tempel, Pasar Kejambon, Pasar Ngablak, Pasar Balerante, Pasar Nggowo, Pasar Butuh, dan Pasar Banjarharjo).
 - e) Penataan PKL di 15 kecamatan, yaitu kecamatan: Sleman, Mlati, Gamping, Godean, Moyudan, Seyegan, Tempel, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik, Depok, Kalasan, Berbah, Prambanan.



5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

- a) Sosialisasi pemeliharaan bangunan pasar di 5 pasar (Pasar Cebongan, Pasar Sleman, Pasar Tempel, Pasar Sambilegi, dan Pasar Gentan).
- b) Kajian pengembangan Pasar Hewan Prambanan 1 dokumen, DED Pasar Sleman 1 dokumen, dokumen perijinan Pasar Prambanan 1 dokumen.
- c) Pemeliharaan bangunan 25 pasar.
- d) Pendampingan pembangunan 3 pasar (Pasar Prambanan, Pasar Godean, dan Pasar Sleman).
- e) Pembangunan Pasar Kebonagung 1 unit.
- f) Pembangunan Pasar Prambanan 1 lokasi, pembangunan Pasar Welut Godean 1 lokasi, penataan halaman Pasar Welut Godean 1 lokasi, rehab Pasar Cebongan 1 lokasi, rehab Pasar Krempyeng Moyudan dan pasang conblock Pasar Godean 2 lokasi.

6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar:

- a) Pelayanan pedagang pasar di 7 UPT Pelayanan Pasar dan Taman Kuliner.
- b) Pembinaan pedagang pasar dan komunitas pasar di 7 UPT Pelayanan Pasar.
- c) Pembinaan pengelola pasar desa 28 orang dan pendampingan pengelolaan 2 pasar desa.
- d) Penataan pedagang dan tempat dagangan di 3 pasar.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan sebagaimana buku lampiran)

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, berhasil meningkatkan jumlah sarana perdagangan menjadi 384 buah atau meningkat 23,93%. Jumlah perusahaan yang berizin pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sejumlah 12.917 perusahaan atau meningkat 5,03%, mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sejumlah 12.538 perusahaan atau

meningkat 5,10%, dan mempunyai TDG sejumlah 127 perusahaan atau meningkat 9,48%, serta menyerap tenaga kerja 115.339 orang.

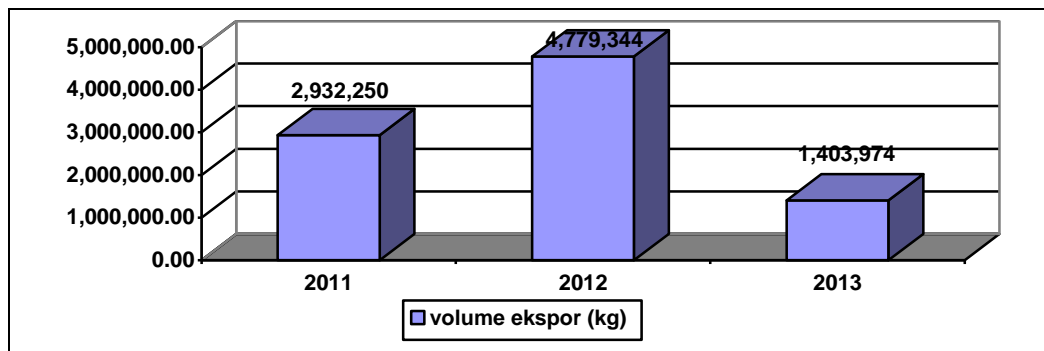
Tabel 3.59. Perkembangan Hasil Terkait Urusan Perdagangan Tahun 2011-2013

No.	Uraian Data	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Jumlah sarana perdagangan	299	305	376
	a. Pasar tradisional/desa	39	39	39
	b. Pasar tradisional/kabupaten	38	38	38
	c. Pasar hewan	4	4	4
	d. Toko Modern	218	224	295
2	Jumlah usaha perdagangan	11.939	12.533	13.141
	a. PT	1.681	1.813	1933
	b. CV	3.299	3.523	3787
	c. Koperasi	461	472	477
	d. Perorangan	6.008	6.232	6445
	e. Badan usaha lain	490	493	499
3	Jumlah perusahaan yang berizin			
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan	11.679	12.298	12.917
	b. Tanda Daftar Perusahaan	11.336	11.930	12.538
	c. Tanda Daftar Gudang	106	116	127
4	Jumlah tenaga kerja usaha perdagangan (yang memiliki SIUP)	90.271	101.654	115.339

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan Dinas Pasar

Jumlah usaha ekspor tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan volume ekspor yang cukup besar dari 4.779.343,83 kg menjadi 1.403.973,76 kg atau turun sebesar 70,62%. Kondisi ini disebabkan penurunan permintaan ekspor dari pasar Amerika dan Eropa sebagai dampak dari krisis ekonomi di negara-negara tersebut.

Grafik 3.37. Perkembangan Usaha Ekspor Tahun 2011-2013



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Keberhasilan urusan perdagangan dapat dilihat dari prestasi yang diraih yaitu dengan diberikannya penghargaan Prima Niyarta kepada PT Mataram Tunggal Garment sebagai eksportir berkinerja urutan ke 5 skala nasional dari Kementerian Perdagangan.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan perdagangan adalah Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta didukung oleh Dinas Pasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Perekonomian Setda, dan 15 kecamatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perdagangan di Bidang Perdagangan berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perdagangan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar Rp16.661.674.150,00 realisasi Rp14.583.923.985,61 atau 87,53%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, anggaran sebesar Rp141.861.000,00 realisasi Rp140.671.300,00 atau 99,16%.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar Rp779.210.500,00 realisasi Rp642.014.852,00 atau 82,39%.

- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, anggaran sebesar Rp102.948.000,00 realisasi Rp101.340.300,00 atau 98,44%.
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, anggaran sebesar Rp441.720.000,00 realisasi Rp381.820.700,00 atau 86,44%.
- 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi, anggaran sebesar Rp14.654.170.650,00 realisasi Rp12.799.636.483,61 atau 87,34%.
- 6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, anggaran sebesar Rp541.764.000,00 realisasi Rp518.440.350,00 atau 95,69%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Perdagangan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perdagangan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Harga barang yang beredar khususnya barang dalam pengawasan belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran barang.
- 2) Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar global maupun nasional terutama dalam mengimbangi produk-produk impor. Solusi yang telah dilakukan adalah melalui peningkatan mutu produk.
- 3) Kondisi sebagian pasar tradisional yang sudah tidak lagi mampu secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan pedagang serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yang ditempuh adalah dengan pendampingan pembangunan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan melakukan rehabilitasi beberapa pasar tradisional serta pendampingan dan pembinaan kepada pedagang pasar dalam penataan dagangan dan pelayanan kepada konsumen.



8. Urusan Ketrasmigrasian

a. Program dan Kegiatan

Program Transmigrasi Regional

- 1) Penyuluhan transmigrasi regional
- 2) Bimbingan petugas pendaftar dan validasi minat transmigrasi
- 3) Penyiapan pelayanan penempatan calon transmigran
- 4) Fasilitasi pengembangan usaha bagi transmigran paska penempatan
- 5) Fasilitasi Forum Mitra Makarya Muktitama

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Transmigrasi Regional

- 1) Penyuluhan transmigrasi di 30 lokasi yang diikuti oleh 750 orang peserta yang terdiri dari perangkat desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat.
- 2) Pembinaan bagi petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantrans) dan Petugas Teknis Pelayanan Penempatan Transmigrasi (PTP2T) sebanyak 103 orang dari 17 kecamatan 86 desa.
- 3) Seleksi calon transmigran sebanyak 30 KK terseleksi , pembinaan calon transmigran terseleksi yang dilaksanakan 2 angkatan dengan jumlah peserta 80 KK, penyerahan bantuan peralatan kerja pertanian dan pertukangan kepada 10 KK calon transmigran yang diberangkatkan ke Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat sebanyak 5 KK dan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebanyak 5 KK.
- 4) Monitoring transmigran penempatan tahun 2010, 2011 dan 2012 di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kuburaya Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara serta pemberian bantuan modal kepada 33 KK transmigran di Kabupaten Tana Tidung (25 KK) dan di Kabupaten Bulungan (8 KK) melalui proses bantuan keuangan antar pemerintah daerah.
- 5) Penjajakan 1 (satu) calon lokasi penempatan transmigrasi di Lokasi Tana Abang SP.2 Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera

Selatan dan terlaksananya Perjanjian Kerjasama Antar Daerah tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi di 2 lokasi yaitu Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan transmigrasi adalah Bidang Tenaga Kerja. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketransmigrasian di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 21 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan ketransmigrasian menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi melalui program transmigrasi regional sebesar Rp480.185.000,00 realisasi Rp207.220.900,00 atau 43,15%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Transmigrasi melalui sinkronisasi usulan hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.



h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Terdapat 40 KK calon transmigran yang tidak bisa diberangkatkan karena: a) ketidaksiapan daerah penempatan di Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat 10 KK dan Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara 10 KK, b) terbatasnya kuota penempatan sehingga masuk daftar tunggu untuk penempatan tahun berikutnya (20 KK). Solusi yang dilakukan adalah calon transmigran akan diberangkatkan pada tahun 2014.
- 2) Bantuan Modal bagi transmigran tidak seluruhnya didukung oleh peraturan yang memadai. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Nakertrans Republik Indonesia.
- 3) Calon lokasi penempatan transmigrasi belum siap oleh pemerintah daerah penempatan. Solusi yang dilakukan adalah mengganti lokasi penempatan transmigrasi di tahun berikutnya melalui kerja sama antar daerah.